

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini terdapat dua variabel, dimana dua variabel tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi sehingga menjadi rumusan masalah untuk kemudian menjadi suatu pembahasan. Adapun variabel tersebut adalah Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dimana variabel ini mempengaruhi variabel dependen yaitu Kondisi Kemiskinan. Untuk variabel Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan itu sendiri terdiri dari beberapa indikator yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi (sikap pelaksana), dan Struktur Birokrasi. Adapun kesimpulan dari keseluruhan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya proses transmisi komunikasi/sosialisasi, penyampaian informasi yang dilakukan Tim Penanggulangan kemiskinan Setempat, dan alur sosialisai yang digunakan sebagai arahan dalam melaksanakan tugasnya. Proses komunikasi yang dilakukan di Desa Argomulyo, Desa Srihardono, dan Desa Terong berjalan dengan baik. berdasarkan perhitungan diketahui bahwa Varibel komunikasi yang mendapat nilai tertinggi adalah Desa Terong, kemudian Desa Srihardono dan yang

terakhir Desa Argomulyo. Berdasarkan kategori tersebut namun komunikasi di Desa Argomulyo, Desa Srihardono, dan Desa Terong termasuk kategori yang baik.

2. Sumber daya dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah berjalan dengan baik. dimana sumberdaya ini terbagi menjadi sumberdaya manusia dan sumberdaya material. Sumberdaya manusia di Desa Argomulyo, Desa Srihardono, dan Desa Terong sudah berjalan dengan baik karena telah memiliki staf ataupun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing, sedangkan sumber daya material berupa fasilitas dan dana yang diberikan. Dana yang diberikan dalam penanggulangan kemiskinan berupa dana yang bersumber dari APBN, APBD DIY, APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak terikat.
3. Disposisi dan sikap pelaksanaan Berdasarkan hasil kuesioner dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Disposisi atau sikap pelaksanaan program dalam penanggulangan kemiskinan telah berjalan dengan baik walaupun adanya perbedaan antara ketiga desa tersebut. Berdasarkan hasil kuesioner diatas diketahui bahwa Adanya dukungan yang diberikan oleh setiap pelaksanaan terhadap pelayanan program penanggulangan kemiskinan; Adanya respon

masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan; Adanya sikap timbal balik antara pelaksana dengan peserta program penanggulangan kemiskinan; Sikap pelaksana terhadap pelayanan program penanggulangan kemiskinan telah sesuai dengan kapasitas dan tugas yang diembannya; dan Pemahaman Tim Penanggulangan kemiskinan atas sikap pelayanan, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan serta tanggung jawab.

4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Argomulyo, Desa Srihardono, dan Desa Terong telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 dan SOP ataupun aturan yang ada.
5. Kondisi kemiskinan yang ada di Desa Argomulyo, Desa Srihardono, dan Desa Terong termasuk kategori kemiskinan yang tinggi atau dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Bantul dengan kategori sangat miskin, miskin, dan rawan miskin.

B. Saran

Saran merupakan solusi yang diberikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi, maka berdasarkan kesimpulan diatas dapat dibuat beberapa saran bagi pemerintah desa bersangkutan.

1. Komunikasi atau sosialisasi dalam program penanggulangan kemiskina harus dilakukan secara rutin. Terutama TKPK Kabupaten harus rutin melakukan monitoring ke desa-desa.
2. Dalam penggunaan dana dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan sebaiknya lebih transparan, sehingga masyarakat tau berapa jumlah yang digunakan dan digunakan untuk apa saja.
3. Tim Penanggulangan Kemiskinan dalam menjalankan tugasnya harus berfokus pada Surat Keputusan Lurah ataupun SOP yang ada. Selain itu khusus Desa Srihardono agar segera membuat Surat keputusan Lurah Terkait Penanggulangan Kemiskinan.
4. Tim Penanggulangan Kemiskinan dalam mendata masyarakat miskin harus cermat siapa yang berhak mendapat bantuan.
5. Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan kondisi kemiskinan yang ada didesa dan selalu memonitorng program yang dijalan oleh Tim Penanggulangan kemiskinan Desa dan Pedukuhan.